



**IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
DI DESA CENTONG KECAMATAN GONDANG KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

FERA TIARA YUNITASARI

NPM 21901091058



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMUADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2023**

RINGKASAN

Fera Tiara Yunitasari, 2023 NPM 21901091058, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, Dosen Pembimbing I: Dr. Nurul Umi Ati, M.AP, Dosen Pembimbing II: Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan seberapa berhasil dalam implementasi sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Adapun yang melatar belakangi penulis tertarik untuk membuat skripsi ini didasarkan pada hasil pengamatan awal penulis melihat dimana desa centong dalam hal pengelolaan keuangan melalui aplikasi siskeudes masih belum optimal. Dimana tujuan penulis dalam hal mengelola keuangan desa di harapkan lebih maksimal dalam hal pelaporan keuangan serta aparat desa bisa bersifat terbuka dan transparan terhadap masyarakat. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui apa saja upaya yang dilakukan dalam proses pengelolaan keuangan, faktor pendukung apa saja dalam mengimplementasikan system keuangan desa (siskeudes) dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan system keuangan desa di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan, pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman dan Saldhana yaitu antara lain *data collection* (pengumpulan data), *data condensation* (kondensasi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Peneliti menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis negative dan *membercheck*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) implementasi system keuangan desa (siskeudes) di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. (2) Faktor Pendukung meliputi sarana dan prasarana yang mendukung dalam mengimplementasikan system keuangan desa (siskeudes) di Desa Centong Kecamatan Gondang. (3) Faktor penghambat meliputi sumber daya dan infrastruktur.

Kata Kunci: *Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Pengelolaan Keuangan Desa*

SUMMARY

Fera Tiara Yunitasari, 2023 NPM 21901091058, Study Program of Public Administration, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Revitalization of Education Policy at the Education Office of Sampang Regency, Supervisory Lecturer I: Dr. Nurul Umi Ati, M.AP, Supervisory Lecturer II: Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP

This thesis is the result of research that describes how successful the implementation of the village financial system (siskeudes) is in Centong Village, Gondang District, Mojokerto Regency. As for the background, the author is interested in writing this thesis, based on the results of the initial observations of the author, where Centong village in terms of financial management through the siskeudes application is still not optimal. Where is the author's goal in terms of managing village finances, it is hoped that it will be more optimal in terms of financial reporting and that village officials can be open and transparent to the community. Therefore the author wants to know what efforts are being made in the process of financial management, what are the supporting factors in implementing the village financial system (siskeudes) and what are the obstacles in implementing the village financial system in Centong Village, Gondang District, Mojokerto Regency.

This research method is to use a qualitative approach and descriptive research type. Qualitative descriptive research method, namely research used to describe events and phenomena that occur in the field, data collection is carried out using techniques, observation, interviews and documentation. Data analysis in this study used the interactive analysis model Miles, Huberman and Saldhana, namely data collection, data condensation, data display and conclusion. Researchers used observation extension, increased persistence, triangulation, discussion with colleagues, negative analysis and member check.

The results of this study indicate that (1) the implementation of the village financial system (siskeudes) in Centong Village, Gondang District, Mojokerto Regency. (2) Supporting factors include supporting facilities and infrastructure in implementing the village financial system (siskeudes) in Centong Village, Gondang District. Resource and infrastructure inhibiting factors.

Keywords: *Village Financial System Implementation (Siskeudes), Village Financial Management*

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah besar hingga kecil, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa. Tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa. Desa merupakan penghubung yang paling akhir dengan masyarakat.

Dalam undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Menurut H.A.W Widjaja (2003:3) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu, desa diberikan sebuah kebebasan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri guna untuk bisa mensejahterahkan masyarakatnya. Dilihat dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, negara banyak mengalami berbagai perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut sudah dilakukan di setiap desa-desa yang ada di Negara Indonesia. Perubahan tersebut bisa dilihat pada penggunaan aplikasi yang bisa diakses oleh pegawai kantor desa yaitu pada pengelolaan keuangan desa. Perubahan tersebut bertujuan demi lancarnya sebuah pengelolaan yang ada di desa. Perubahan tersebut merupakan upaya

Pemerintah pusat untuk mendukung terwujudnya tata kelola desa yang baik dalam penyelenggaraan desa, selain itu agar dalam mengaplikasikan sebuah sistem pengelolaan keuangan yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan keuangan diharapkan mampu memberikan pelaporan keuangan yang terstruktur dan terperinci. Hal ini akan memudahkan sebuah pertanggungjawaban keuangan. Perlu diketahui bahwasanya pengelolaan keuangan sangatlah penting untuk diterapkan, karena desa mempunyai kewajiban harus bisa mengelola keuangan dengan sebaik baiknya agar terwujudnya asas pengelolaan desa yang baik juga.

Menurut (Purba et al. 2021) pengelolaan keuangan desa adalah seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilalui dengan tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah di laksanakan dalam tahun anggaran. Siklus tersebut merupakan rangkaian yang harus dijalankan secara berurutan dimana tahap satu dengan tahap lainnya saling berhubungan sehingga apabila terjadi kesalahan didalam satu tahap maka dalam tahapan berikutnya akan terganggu dan tidak akan bisa terwujudnya asas pengelolaan.

Tahapan pengelolaan keuangan desa biasanya dimulai dari perencanaan. Perencanaan merupakan tahapan untuk menentukan tindakan yang tepat di masa yang akan datang. Dengan perencanaan maka kita akan mengetahui sumber daya manusia yang tersedia dan perencanaan yang meliputi penyusunan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa dan RKPDesa pada tahun yang ditentukan oleh sekretaris desa dan disampikan kepada kepala desa. Tahapan kedua adalah pelaksanaan, tahapan pelaksanaan adalah proses pengeluaran dan penerimaan menggunakan rekening kas desa dengan bukti yang lengkap dan sah. Tahapan ketiga yaitu penatausahaan meliputi pengelolaan keuangan desa yang diatur untuk mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Kegiatan dari

penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang melalui kas (Mamuaya, Sabijono, and Gamaliel 2017).

Tahapan selanjutnya terkait dengan pengelolaan keuangan desa adalah tahap pelaporan yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh aparat desa kepada Pemerintah Daerah dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat (Mamuaya et al. 2017). Setelah melalui tahapan pelaporan, tahapan selanjutnya adalah pengelolaan keuangan yaitu pertanggungjawaban. Pertanggung jawaban adalah proses penyampaian laporan kegiatan berupa pengeluaran keuangan yang telah direalisasikan oleh desa selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan pembahasan terkait pengelolaan keuangan diatas, maka tujuan dengan adanya pengelolaan keuangan disusun agar bisa memberikan informasi yang lebih efektif dan tepat sebagai media transaksi keuangan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga pelaporan keuangan. Dengan diterapkannya perubahan pada lembaga keuangan di Indonesia, perubahan perlu dilakukan pada berbagai lembaga keuangan agar dapat beroperasi secara lebih efisien.

Ditemukan dalam anggaran desa yang telah di distribusikan oleh pusat ternyata banyak disalahgunakan oleh aparat desa karena dalam pengelolaan anggaran aparat desa masih kurang memahami pengelolaan. Hal ini berdasarkan pantauan ICW (*Indonesia corruption watch*) tentang praktek korupsi penggunaan dana desa yang ditemukan 110 kasus korupsi anggaran desa sejak 2016 - Agustus 2017 dengan total kerugian sekitar 30 miliar. Pada 110 kasus korupsi anggaran dana desa dan terdapat 139 pelaku, 107 pelaku korupsi anggaran dana desa 139 pelaku yaitu kepala desa (BPKP, 2016).

Maka dari itu dalam pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan pada peraturan desa tentang anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas rencana pengeluaran desa. Pengelolaan keuangan desa bisa dikatakan baik

apabila desa memiliki akuntabilitas dan transparansi agar aparatur desa memiliki perilaku yang sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku.

Keuangan desa diperoleh dari pendapatan asli desa yang harus dikelola dengan baik dan jujur demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Dalam peningkatan sumber perekonomian masyarakat dapat melalui kebijakan dana desa. Sebagai aparatur desa diharapkan agar lebih baik dalam mengelolah pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan sumber kekayaan yang dimiliki desa. Dalam pengelolaan keuangan desa tentunya mempunyai tanggung jawab yang besar dari aparat pemerintah desa.

Dalam undang-undang nomor 66 tahun 2014 pasal 72 menyebutkan sumber pendapatan asli desa terdiri dari pendapatan asli desa (PAD), bagi hasil pajak (PBH) dan retribusi daerah kabupaten/kota (BHPRD), alokasi anggaran APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan PBD kabupaten/kota, serta dana hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak lain. Hal ini memberikan keleluasan kepada desa untuk mengatur keuangan desa itu sendiri, sehingga mampu menciptakan desa mandiri yang tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Simbolon (2006) keuangan desa harus bersifat akuntabilitas karena itu merupakan kewajiban dari aparat atau organisasi untuk menyampaikan pertanggungjawaban terhadap kinerja kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Dalam hal tersebut aparat pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawabannya dalam melaporkan laporan keuangannya kepada pemerintah dan masyarakat, karena organisasi pemerintah desa merupakan lembaga yang berorientasi kepada masyarakat atau publik. Laporan keuangan ada yang disusun untuk menyediakan suatu informasi yang efektif dan relevan mengenai transaksi keuangan dan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebuah pegawai dalam pelaporan keuangan. Seiring dengan reformasi di bidang keuangan di Indonesia, maka perlu dilakukan perubahan

di berbagai bidang keuangan negara agar dapat berjalan dengan baik dan efektif (Rahmawati & Fajar, 2017).

Dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan desa yang bertanggungjawab adalah kepala desa dengan menyampaikan pertanggungjawaban kepada walikota/bupati. Mengingat kepala desa yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan penggunaan dana desa, maka kepala desa harus bisa mempertanggung jawabkan dengan baik. Dengan begitu untuk mencegah terjadinya korupsi dibentuklah aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam mengelola anggaran desa. Pemerintah desa membantu kebijakan dalam mengelola keuangan desa. Untuk melanjutkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui dana desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meluncurkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes).

Sistem pengelolaan keuangan desa harus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Menurut Griendle dalam Wahab (2002: 59) implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu. Implementasi kebijakan menyangkut siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan, oleh karena itu ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan agar kebijakan itu bisa dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkolaborasi dengan Permendagri guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi

pengelolaan keuangan desa dibuat sederhana dan password yang sederhana sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa. (BPKP, 2016). Sistem keuangan desa (Siskeudes) ini sebelumnya sudah dikenal dengan nama aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Akan tetapi, seiring berjalannya waktu aplikasi sistem informasi manajemen daerah kini telah diubah menjadi siskeudes.

Kabupaten Mojokerto terdapat 18 kecamatan dan 299 desa. Dan itu sudah menerapkan sistem keuangan desa (Siskeudes) yang penggunaan anggaran dana desa sudah bisa dipantau secara langsung. Namun di kabupaten Mojokerto sendiri masih banyak ditemukan kepala desa dengan sumber daya manusia yang rendah dan ceroboh dalam mengolah anggaran. (Radar Mojokerto).

Berdasarkan data indeks pembangunan di Kabupaten Mojokerto masih terdapat desa dengan kategori tertinggal. Ini masih menjadi perhatian bagi kita semua agar terus bekerja semaksimal mungkin sehingga dapat mengatasi kesenjangan yang dihadapi oleh masyarakat. Pemerintah daerah harus terus berupaya melakukan berbagai hal agar bisa menciptakan desa yang mandiri. Saat ini kondisi desa-desa yang ada di Kabupaten Mojokerto sudah semakin maju. Di buktikan dengan pendapatan dan belanja desa (APBDesa) rata-rata sudah mencapai 1 miliar. Semakin besar anggaran yang diterima semakin besar tanggung jawab yang harus diemban oleh kepala desa.

Desa Centong Kecamatan Gondang merupakan salah satu desa yang telah menerapkan sistem keuangan desa (Siskeudes) sejak tahun 2017. Hal ini dikarenakan pemerintahan desa telah melakukan pelatihan bimtek sehingga Desa Centong bisa menjalankan dan mengoperasikan aplikasi. Hal ini seharusnya membuat pengelolaan keuangan desa semakin optimal. Namun berdasarkan observasi peneliti di lapangan menemukan adanya masalah pada sistem keuangan desa (Siskeudes) yang belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia khususnya bidang keuangan

belum terlalu memahami sistem keuangan desa (Siskeudes). Selain itu masih banyak aparat desa yang bekerja tidak sesuai dengan skill ataupun pendidikannya. Bahkan ada beberapa aparat desa yang memiliki pendidikan hanya sebatas SMA. Dengan pendidikan yang belum tinggi dan skill yang masih rendah membuat aparat desa untuk lebih bekerja keras agar bisa menguasai dan memahami aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Selain itu sering terjadinya eror pada aplikasi ketika membuka sistem keuangan desa (siskeudes) dikarenakan bersamaan yang membuka. Dan dalam menginput pegawai desa masih manual. Dari latar belakang diatas peneliti berfokus pada beberapa point, di antaranya yaitu :

1. Terkait sumber daya manusia khususnya dibidang keuangan Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto kurang kompetensi dan kurang memadai.
2. Lemahnya aplikasi dikarenakan sering terjadinya eror.

Hadirnya sistem keuangan desa (siskeudes) ini merupakan fenomena terbaru dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga dengan diterapkannya aplikasi tersebut diharapkan membawa perubahan yang lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan di kantor Desa Centong. Dalam hal ini peneliti ingin melihat implementasi siskeudes dari berbagai variable model implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn (1975) diantaranya ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri-ciri sifat badan atau instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi, social dan politik.

Dari problematika diatas peneliti ingin melakukan penelitian dengan melihat pengelolaan keuangan di kantor Desa Centong dengan menerapkan sistem keuangan desa (siskeudes) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan dan

pertanggung jawaban dengan indikator model implementasi Van Metter dan Van Horn (1975). Maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto).”

B. Permasalahan

Dari uraian dan latar belakang yang telah dijelaskan dan dipaparkan oleh peneliti diatas, peneliti menemukan beberapa *problem* yang akan dijawab nantinya pada hasil dan pembahasan penelitian.

1. Bagaimana implementasi sistem keuangan desa (siskeudes) Di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam mengimplementasikan sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto?
3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah sesuatu yang ingin diteliti sehingga peneliti dapat merinci kembali bahasan yang akan diteliti. Penetapan fokus penelitian dilakukan agar peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang akan diperoleh.

Menurut Moleng (2011:97) fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti maupun melalui pengetahuan yang diperoleh melalui keputusan ilmiah atau kepustakaan lainnya, apabila peneliti merasakan melalui

kepuustakaan ilmiah, peneliti menemukan masalah sebaiknya harus mendalami kepuustakaan yang relevan sebelum terjun ke lapangan. Dengan penetapan fokus yang jelas, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu dikumpulkan. Fokus penelitian ini bertujuan agar bisa membatasi peneliti sehingga terhindar dan tidak terjebak data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti memfokuskan pada :

1. Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto) berdasarkan model implementasi Van Metter dan Van Horn (1975) sebagai berikut :
 - a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
 - b. Sumber Daya
 - c. Karakteristik Agen Pelaksana
 - d. Sikap Atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
 - e. Komunikasi Antar Organisasi
 - f. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik
2. Faktor pendukung dalam mengimplementasikan sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Centong Kecamatan Gondang.
 - a. Sarana dan Prasarana
 - b. Jurnal Siskeudes
3. Faktor penghambat dalam mengimplementasikan sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.
 - a. Terkait sumber daya manusia khususnya dibidang keuangan Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto kurang kompetensi dan memadai.

- b. Lemahnya aplikasi dikarenakan sering terjadinya eror.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut, yaitu :

1. Untuk mengetahui Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam implementasi sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Centong kecamatan gondang kabupaten mojokerto.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis :
 - a. Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan tentang teori atau konsep yang diperoleh selama perkuliahan dan menerapkannya di kehidupan nyata.
 - b. Dapat memberikan masukan bagi pembaca dan pengembangan peneliti serupa.
2. Manfaat secara praktis :
 - a. Peneliti
Menambah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik yang berkaitan tentang masalah dan implementasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan.
 - b. Instansi

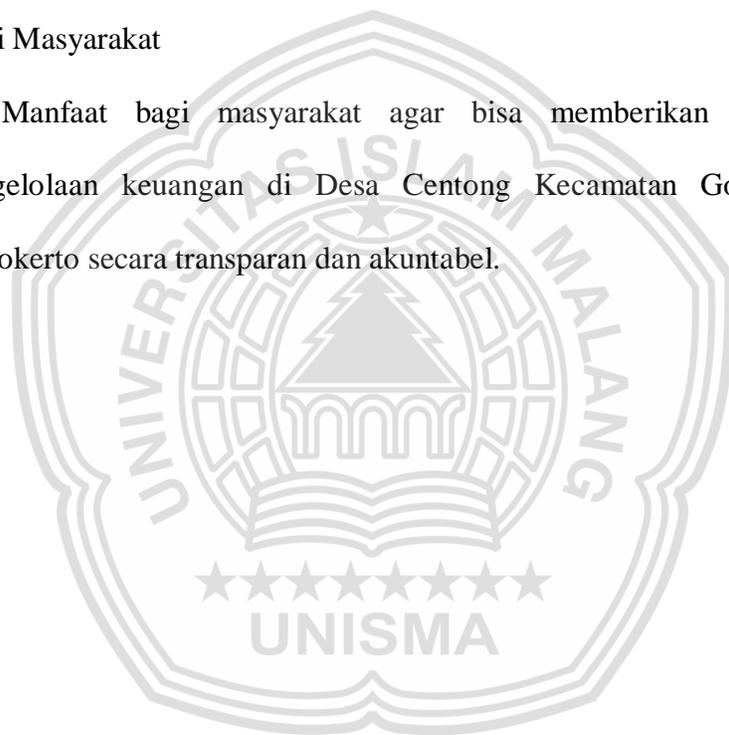
Manfaat yang didapat oleh pihak pegawai Desa Centong Kecamatan Gondang sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.

c. Bagi Universitas

Mendapatkan hasil riset dari penelitian ini terkait masalah atau keadaan di lapangan, agar kedepannya dapat menjadi pengembangan kurikulum. Disamping itu juga sebagai pengetahuan bagaimana implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan.

d. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat agar bisa memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto secara transparan dan akuntabel.



PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto yang telah dilakukan peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya :

1. Implementasi sistem keuangan Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto

Dari beberapa indikator yang peneliti ambil untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem keuangan desa itu dapat diketahui dari enam indikator point yang peneliti gunakan diantaranya yaitu :

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan, dalam indikator ini ditemukan bahwasanya aparatur Desa Centong dalam menerapkan sistem keuangan desa sudah sesuai. Karena ukuran dalam implementasi kebijakan itu menentukan program apa saja yang dirancang dan sudah dilaksanakan atau belum. Sedangkan tujuan kebijakan agar aparatur desa bisa bersifat keterbukaan dalam merancang program-program yang akan dilaksanakan. Hal ini aparatur desa membuat program bersama BPD, LPM dan tokoh masyarakat.
- b. Sumber Daya, pada poin ini merupakan salah satu poin yang dapat mewujudkan suatu implementasi kebijakan sistem keuangan desa. Ditemukan bahwasanya sumber daya yang ada di Desa Centong itu kurang memadai terkait dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan. Hal ini dipengaruhi karena tingkat pendidikan aparatur desa yang rata-rata tingkat SMA. Dan terkait dengan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah pusat

- kepada pemerintah desa masih kurang. Selain itu sumber daya juga bekerja dua kali terkait dengan penginputan keuangan. Aparatur desa centong biasanya menginput melalui excel lalu memindahkan kedalam aplikasi siskudes.
- c. Karakteristik organisasi pelaksana, indikator yang dimaksud pada poin ini yakni pada karakteristik organisasi pelaksana yang dilakukan oleh aparatur Desa Centong yaitu organisasi yang terkait diantaranya yaitu bendahara desa, kepala desa dan sekretaris desa. Terkait dengan kinerja bendara desa masih kurang maksimal dikarenakan sering menginput tanggal yang sudah ditentukan.
 - d. Komunikasi Antar Organisasi, indikator yang dimaksud pada poin ini yakni komunikasi yang dilakukan oleh aparatur desa centong sudah sesuai. Mereka mengundang tokoh masyarakat, BPD, LPM untuk melakukan koordinasi terkait perancangan APBdesa. Koordinasi dilakukan aparatur dengan kepala desa terkait dengan kendala mereka melakukan musyawarah.
 - e. Sikap para pelaksana, poin ini berkaitan dengan aparat desa Centong dalam hal disiplin laporan keuangan ditemukan peneliti terkadang lambat dalam hal pelaporan karena aparat desa seringkali menginput mendekati tanggal yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.
 - f. Lingkungan ekonomi, politik dan social, dalam poin ini lingkungan ekonomi, politik dan social sudah tepat. Karena lingkungan eksternal sudah cukup berperan serta berpartisipasi dalam mengikuti musyawarah desa terkait dengan APBDesa.

Dilihat dari keseluruhan proses yang dilakukan peneliti sesuai dengan indikator-indikator pengukuran implementasi kebijakan yang ada di kantor Desa Centong Kecamatan Gondang, dapat disimpulkan bahwasanya beberapa indikator dapat terpenuhi. Akan tetapi dalam beberapa indikator juga muncul permasalahan sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan adanya kendala yang mengakibatkan kurang efektif dan berjalan dengan baik. Beberapa poin yang menjadi perhatian yakni terkait dengan sumber daya manusia kurang memadai.

2. Faktor pendukung implementasi sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto yakni,

a. Sarana dan Parsarana

Dalam mendukung system keuangan desa yang baik dan efisien maka sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah computer yang memadai, jaringan wifi yang memadai dan peralatan lain yang dibutuhkan

b. Jurnal Siskeudes

Dalam mendukung sistem keuangan desa (siskeudes) jurnal siskeudes digunakan sebagai pedoman untuk melaporkan keuangan desa.

3. Faktor Penghambat Implementasi Sistem keuangan desa, yakni :

a. Sumber daya

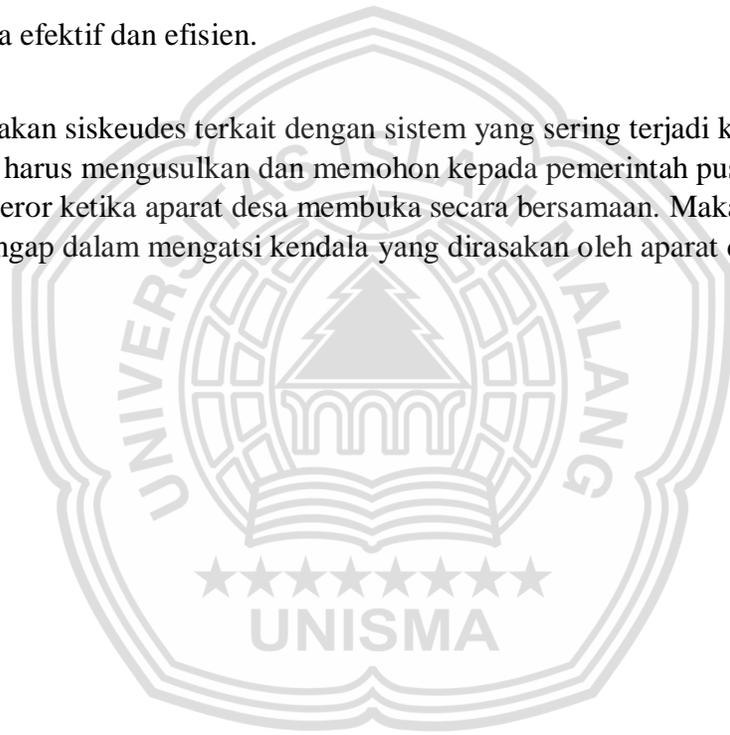
b. Aplikasi Error

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa saran rekomendasi dan juga perbaikan terkait dengan sistem keuangan yang ada di Desa Centong Kecamatan Gondang, di antaranya :

1. Peningkatan proses terkait dengan skill perlu ditambah, hal ini diperuntukkan kepada sumber daya pemegang operator agar bisa menambah pelatihan bimtek secara mandiri. Karena ditemukan peneliti dilapangan bahwsanya terkait dengan pelatihan bimtek yang ada di Kabupaten Mojokerto hanya dilakukan satu tahun sekali dan itu masih kurang efektif. Maka pemerintah desa harus menambah pelatihan secara mandiri agar operator desa (Siskeudes) bisa mengoperasikan siskeudes dengan baik sehingga kinerja pegawai dalam pengoperasi siskeudes bisa efektif dan efisien.

Peningkatan kebijakan siskeudes terkait dengan sistem yang sering terjadi kendala harus segera aparatur desa harus mengusulkan dan memohon kepada pemerintah pusat terkait dengan aplikasi yang sering eror ketika aparat desa membuka secara bersamaan. Maka pemerintah pusat harus lebih cepat, tangap dalam mengatsi kendala yang dirasakan oleh aparat desa.



DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- A.W. Widjaja. 2003, Otonomi Desa. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada
- Abdul Wahab, S. Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya. Malang. PT Danar Wijaya, 1999
- Agustiono, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bnadung: Alfabeta
- Ardi hamzah, 2015, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera Dan Partisipatoris*, Sumenep, Pustaka
- BPKP, B. P. K. dan P. (2016). *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta
- H.A, Tabrani Rusyan (2016) Seri Pemerintahan Desa- Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2014
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok : PT Raja Grafindo Persada
- Indrianasari, 2017, *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengolaan*, Manado, Universitas Sam Ratulangi
- Miles, M.B dan A.M Huberman. 2014. Analisis Data Kualitatif: Buku sumber tentang metode- ,metode baru. Jakarta.UI Press
- Moloeng, L. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Moloeng, L.j. 2011. Metode Penelitian Kualitatif
- Murtiono & Wulandari, 2017, *Pengolaan Alokasi Dana Desa (Add) Didesa Toapaya*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang
- Nughero, riant 2009. Publik Policy
- Purba et al., m (2021:14). *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Simbolan (2006) *Akuntabilitas Birokrasi-Publik*
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA
- Wahab, 2014, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara
- Wahab, 2014, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara

BUKU ELEKTRONIK

Hamzah, A. (2015). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Penerbit Pustaka Jawa Timur.

Purba, B., Arfandi, S. N., Purba, E., Sitorus, S., Panjaitan, P. D., Damanik, D., & Simarmata, H. M. P. (2021). *Ekonomi Demografi*. Yayasan Kita Menulis.

SUMBER UNDANG-UNDANG

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Dasar No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

SKRIPSI

Ade Myrna Alfina, 2020. *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Untuk Mewujudkan Keuangan Desa Yang Akuntabel Dan Transparan(Studi Pada Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*. Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ade Myrna Alifina,2020, *Implementasi Aplikasi Sitematika Keuangan Desa (SISKEUDES)Untuk Mewujudkan Keuangan Desa Yang Akuntabel Dan Transparan, Malang, Uin*

Renita Amelia 2020. *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dikanttor Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. Progam Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar*.

Sulistyowati, 2019. *Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus Pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo*.Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jember.

Tias Autdry Permehi Shiella,2021. *Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Perkebunan Tanjung Kasau)*. Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Venni Yustina Hidayanti,2020. *Analisi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Ketanen Kabupaten Gresik*. Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

JURNAL

Baiq Fariestha Auliatari, Eni Indriani, Yusli Mariadi(2022). *Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Di Desa Jatisela*. Universitas Mataram

Deni Triyanto, Adi Sutojo (2020). *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Hadiat Trihutomo Wibowo.*

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. *Evaluasi implementasi sistem tata kelola keuangan desa dengan aplikasi siskeudes.* Dipetik 05 November 2022.

Fani Riani, Rita Kalalinggi, Rosa Anggraeni (2019) *Implementasi Aplikasi Sistem Keuandangesa (Siskeudes) Pada Pemerintahan Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur.*

Radar Mojokerto. *Sistem keuangan desa online, hindari kades terjerat hukum.* Dipetik 05 november 2022.

Sulistyowati, Norita Citra Y, SE.MM, Elok Fitriyah, SE.MSA, AK (2020). *Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus Pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.*

Sumber Internet

Badan Statistik Kab. Mojokerto th 2022

<http://centong-mjkkab.desa.id>

